

**PENGEMBANGAN DAN PERAN KELEMBAGAAN TANI  
PADA PROGRAM PENGEMBANGAN TEH ORGANIK  
DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KAWASAN SENTRA  
PERKEBUNAN TEH ORGANIK DI KANAGARIAN AIA  
BATUMBUAK KECAMATAN GUNUNG TALANG  
KABUPATEN SOLOK**

Oleh:

**LICORNI NATALIVO**  
**04115029**



**JURUSAN SOSIAL EKONOMI  
FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2010**





**PENGEMBANGAN DAN PERAN KELEMBAGAAN TANI  
PADA PROGRAM PENGEMBANGAN TEH ORGANIK  
DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KAWASAN SENTRA  
PERKEBUNAN TEH ORGANIK DI KANAGARIAN AIA  
BATUMBUAK KECAMATAN GUNUNG TALANG  
KABUPATEN SOLOK**

Oleh:

**LICORNI NATALIVO**  
04115029

**SKRIPSI**

**SEBAGAI SALAH SATU SYARAT  
UNTUK MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA PERTANIAN**

**JURUSAN SOSIAL EKONOMI  
FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2010**



**PENGEMBANGAN DAN PERAN KELEMBAGAAN TANI PADA  
PROGRAM PENGEMBANGAN TEH ORGANIK DALAM UPAYA  
MEWUJUDKAN KAWASAN SENTRA PERKEBUNAN TEH ORGANIK  
DI KANAGARIAN AIA BATUMBUAK KECAMATAN GUNUNG  
TALANG KABUPATEN SOLOK**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Aia Batumbuak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok pada bulan Agustus-September 2009. Kabupaten Solok akan menjadikan teh organik sebagai salah satu tanaman yang diunggulkan dalam hal pengembangan perkebunan berbasis organik. Nagari Aia Batumbuak merupakan Nagari dan kawasan pertama yang dipilih oleh pemerintah Kabupaten Solok sebagai wilayah pengembangan perkebunan untuk komoditas teh organik. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode studi kasus, dengan tujuan untuk mengetahui pengembangan dan peran kelembagaan tani pada program pengembangan teh organik yang merupakan program kerjasama antara pemerintah Kabupaten Solok dengan Lembaga CERDAS Bogor. Pengambilan sampel dilakukan secara acak sederhana (*simple random sampling*) terhadap 5 kelompok tani peserta program pengembangan teh organik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan petani primer (kelompok tani) dapat terwujud karena adanya faktor hubungan kekerabatan dan keakraban, kesamaan kepentingan, kesamaan tradisi, bahasa status ekonomi, pemukiman serta luas hamparan usaha, adanya aturan yang jelas tentang hak dan kewajiban dan pemimpin dalam kelompok tani juga merupakan faktor yang mempengaruhi petani bergabung dalam kelompok tani. Pengembangan kelompok tani menjadi asosiasi kelompok tani dipengaruhi oleh faktor dari luar yaitu permintaan dari investor program. Peran petani dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan pengembangan teh organik. Keseluruhan kegiatan pengolahan lahan sampai penanaman dilakukan sendiri oleh petani. Lembaga CERDAS berperan membantu petani dalam memberikan informasi tentang budidaya teh organik. Dalam pengembangan sumberdaya manusia CERDAS berperan dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada petani. Dan untuk pengembangan kelembagaan petani, CERDAS berperan dalam membentuk asosiasi kelompok teh organik (AKTOR). Pemerintah Kabupaten Solok melalui Dishutbun berperan dalam menentukan peserta program pengembangan teh organik dan membentuk kelompok tani teh organik. Dishutbun juga berperan menyediakan dana pendampingan untuk membantu petani dalam membiayai pengolahan lahan sampai pemeliharaan teh organik sebesar 2 juta rupiah untuk masing-masing petani.

Penulis menyarankan kepada Lembaga CERDAS untuk berperan lebih banyak lagi sehingga kemampuan dan pengetahuan petani lebih bertambah. Dishutbun juga diharapkan untuk melihat kondisi petani di lapangan sehingga pemberian dana yang dijanjikan dapat berjalan sesuai dengan permintaan dan kondisi petani.



## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pertanian merupakan sektor penting dan berpotensi besar dalam menunjang pembangunan bangsa. Indonesia merupakan salah satu negara dengan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian dari mayoritas penduduknya. Dengan demikian, sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya pada sector pertanian. Kenyataan yang terjadi bahwa sebagian besar penggunaan lahan di wilayah Indonesia diperuntukkan sebagai lahan pertanian dan hampir 50% dari total angkatan kerja masih menggantungkan nasibnya bekerja di sektor pertanian. Keadaan seperti ini menuntut kebijakan sektor pertanian yang disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan yang terjadi di lapangan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut kesejahteraan bangsa (Dillon, 2004).

Setelah krisis ekonomi tahun 1998 dan resesi yang belum juga berakhir, pilihan bagi bangsa Indonesia tidak bisa lain kecuali berpaling ke pembangunan pertanian. Melalui pembangunan pertanian maka persoalan pertama yang seringkali banyaka menimbulkan permasalahan baru, yakni pengangguran bisa diselesaikan. Untuk itu, hal yang dibutuhkan adalah kemauan politik. Harus ada keyakinan dari para pengambil keputusan bahwa tulang punggung dari bangsa Indonesia adalah kemurahan hati yang diberikan Sang Maha Pencipta untuk memberikan alam yang begitu kaya. Selanjutnya, dibutuhkan suatu kebijakan yang sungguh-sungguh memihak pada pembangunan pertanian. Ada kemudahan dalam pengurusan lahan, kemudahan dalam mendapatkan bibit yang berkualitas dan seragam, kemudahan dalam pengelolaan air, dan kemudahan dalam pembiayaan (Suryopratomo, 2004).

Dengan melihat keadaan dan kondisi sektor pertanian yang sedang mengalami berbagai masalah maka dibutuhkan suatu pemikiran dan gagasan perubahan yang mendasar, yaitu perlu segera *back to basics* dan melakukan transformasi sektor pertanian dan agroindustri melalui reorientasi strategi, kebijakan, dan program, serta revitalisasi kelembagaan mulai dari tingkat aliansi eksportir hingga petani. Secara bertahap, bangsa Indonesia akan berhasil membebaskan diri dari belitan krisis berkepanjangan, jika politik pembangunan

ekonomi bangsa ke depan sungguh-sungguh bersendikan pada kaidah *people driven* dan paradigma *growth through equity*, serta memprioritaskan pembangunan pertanian dan pedesaan (Dillon, 2004).

Peraturan Presiden (PERPRES) Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009 mengamanatkan pembangunan pertanian pedesaan akan ditempuh melalui langkah revitalisasi sektor pertanian. Revitalisasi pertanian dalam arti luas dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja terutama pada sektor pertanian (Deptan, 2005).

Kebijakan revitalisasi pertanian akan ditempuh dengan empat langkah pokok yaitu: (i) peningkatan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya, (ii) penanganan ketahanan pangan, (iii) peningkatan produktivitas dan produksi, dan (iv) peningkatan daya saing dan hasil tambah produk pertanian. Kebijakan revitalisasi pertanian tersebut diikuti dengan langkah-langkah kegiatan antara lain: (a) revitalisasi pertanian dan pendampingan pertanian, peternak dan pekebun (b) menghidupkan dan memperkuat lembaga pertanian dan pedesaan untuk meningkatkan akses petani terhadap sarana produktif, membangun sistem pendukung, dan meningkatkan skala usaha yang dapat meningkatkan posisi tawar petani (Deptan, 2005).

Peningkatan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya merupakan salah satu langkah kebijakan revitalisasi pertanian yang harus terus menerus diperhatikan. Hal ini disebabkan oleh karena, pengalaman pembangunan pertanian yang dilakukan negara-negara berkembang menunjukkan bahwa para petani tidak dianggap sebagai sumber informasi yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan pertanian. Informasi yang dimiliki petani, baik yang menyangkut teknologi pertanian maupun tata cara pemanfaatan sumber daya alam, oleh para perencana pembangunan pertanian dianggap sebagai bukan informasi yang perlu dimanfaatkan, karena tidak ilmiah. Agar dapat berkelanjutan, pertanian harus mampu lebih peka terhadap pengetahuan dari penduduk yang dilayani (Soetrisno, 2006).



Peningkatan posisi tawar petani dapat meningkatkan akses masyarakat pedesaan dalam kegiatan ekonomi yang adil, sehingga bentuk kesenjangan dan kerugian yang dialami oleh para petani dapat dihindarkan. Pengembangan masyarakat petani melalui kelembagaan pertanian/kelompok tani merupakan suatu upaya pemberdayaan terencana yang dilakukan secara sadar dan sungguh-sungguh melalui usaha bersama petani untuk memperbaiki keragaan sistem perekonomian masyarakat pedesaan. Arah pemberdayaan petani akan disesuaikan dengan kesepakatan yang telah dirumuskan bersama. Dengan partisipasi yang tinggi terhadap kelompok tani, diharapkan rasa ikut memiliki dari masyarakat atas semua kegiatan yang dilaksanakan kelompok tani akan juga tinggi (W. Karo-karo, 2007).

## 1.2. Rumusan Masalah

Kebijakan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) yang telah dicanangkan pemerintah 11 Juni 2005 pada hakekatnya merupakan strategi umum meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan petani hutan, meningkatkan daya saing produk pertanian, perikanan dan kehutanan, serta menjaga kelestarian sumberdaya pertanian, perikanan, kehutanan. Kebijakan tersebut dalam strategi operasionalnya mencakup 12 kebijakan integratif yaitu: (1) investasi dan pembiayaan, (2) manajemen pertanahan dan tataruang, (3) pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam, (4) infrastruktur pertanian, perikanan, kehutanan dan pedesaan, (5) pengembangan sumberdaya manusia dan pemberdayaan petani-nelayan, (6) riset dan pengembangan teknologi, (7) kebijakan perdagangan, (8) promosi dan pemasaran, (9) perpajakan dan retribusi, (10) dukungan langsung bagi petani, nelayan dan petani hutan, (11) kebijakan pangan, dan (12) agroindustrialisasi pedesaan (Anjak, 2006).

Terkait dengan implementasi RPPK, sektor pertanian masih dihadapkan pada permasalahan fundamental antara lain: (1) Keterbatasan dan penurunan kapasitas sumberdaya alam pertanian, (2) Sistem alih teknologi yang masih lemah dan kurang tepat sasaran, (3) Keterbatasan aksesibilitas terhadap layanan usaha, terutama permodalan, (4) Rantai tataniaga yang panjang dan sistem pemasaran yang belum adil, (5) Sistem pertanian yang belum mampu memberikan



kesempatan berkembangnya potensi diri petani, (6) Kelembagaan dan posisi tawar petani yang masih rendah, (7) Koordinasi antar lembaga terkait dan birokrasi yang masih lemah, dan (8) Kebijakan ekonomi makro yang belum berpihak kepada sektor pertanian (Anjak, 2006).

Peningkatan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya merupakan salah satu langkah kebijakan revitalisasi pertanian yang harus terus menerus diperhatikan. Hal ini disebabkan oleh karena, pengalaman pembangunan pertanian yang dilakukan negara-negara berkembang menunjukkan bahwa para petani tidak dianggap sebagai sumber informasi yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan pertanian. Informasi yang dimiliki petani, baik yang menyangkut teknologi pertanian maupun tata cara pemanfaatan sumber daya alam, oleh para perencana pembangunan pertanian dianggap sebagai bukan informasi yang perlu dimanfaatkan, karena tidak ilmiah. Agar dapat berkelanjutan, pertanian harus mampu lebih peka terhadap pengetahuan dari penduduk yang dilayani (Soetrisno, 2006).

Pola pikir hampir semua masyarakat Indonesia, termasuk beberapa praktisi dan ahli pertanian dari tahun ke tahun hampir tidak pernah berubah. Pertanian bangsa Indonesia identik dengan produksi gabah dan ketersediaan beras nasional. Padahal beras hanyalah sebagian kecil dari produk-produk pertanian Indonesia. Seharusnya bangsa Indonesia mampu mengubah paradigma pertanian ke arah yang lebih kontemporer dan komprehensif. Berbicara tentang pertanian tidak hanya berbicara beras dan sektor *on-farm*. Pertanian tidak dapat dipisahkan dengan perkebunan, kehutanan, perikanan, teknologi, perdagangan, perbankan, lingkungan, industri, dan yang terpenting adalah masyarakat petani itu sendiri (Nasution, 2004).

Salah satu kegiatan pembangunan pertanian pada sub-sektor perkebunan adalah pengembangan komoditi teh. Menurut Mayuni (1998) Tanaman teh (*Camelia sinensis L*) adalah tanaman perkebunan yang berasal dari daratan Tiongkok. Tanaman ini diperkenalkan oleh bangsa Belanda yang merupakan tanaman penyegar dan menyehatkan sehingga menjadi tanaman industri bagi Indonesia dan juga menjadi komoditi andalan selain minyak dan gas serta tanaman perkebunan lain seperti kelapa sawit, kopra dan sebagainya.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

#### 4.1.1 Letak Geografis

Nagari Aia Batumbuk merupakan salah satu Nagari dari delapan Nagari yang ada di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Jarak Nagari Aia Batumbuk dari Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat ( Padang ) yaitu 37 Km, dan dari Ibu Kota Kabupaten Solok yaitu 20 Km, sedangkan jarak Nagari Aia Batumbuk ke Ibu Kota Kecamatan lebih jauh dari Ibu Kota Kabupaten yaitu 5 Km.

Nagari Aia Batumbuk memiliki luas 16.200 Ha yang terdiri dari lima jorong yaitu Jorong Madang, Koto Baruh, Lambah, Sangkar Puyuh dan Jorong Koto Ateh. Empat buah jorong diantaranya merupakan areal pengembangan perkebunan teh PTPN VI-KDK kecuali Jorong Lambah. Dan untuk areal pengembangan teh organik terdapat pada tiga jorong yaitu Jorong Koto Baruh, jorong Madang dan Jorong Lambah.

Dari 16.200 Ha luas Nagari Aia Batumbuk dipergunakan untuk jalan, sawah, perumahan/pemukiman, perkebunan rakyat dan inti, pekarangan, perladangan, sekolah, perkantoran, lahan kosong, tempat ibadah, perkuburan, hutan, kolam, dan lainnya ( Tabel 5 ).

Tabel 5. Luas Nagari Aia Batumbuk Menurut Penggunaannya

No.	Penggunaan Tanah	Luas ( Ha )	Persentase ( % )
1.	Jalan	8,75	0,05
2.	Sawah	94	0,58
3.	Perumahan / Pemukiman	13	0,08
4.	Perkebunan Rakyat Dan Inti	388,5	2,4
5.	Pekarangan	55	0,34
6.	Perladangan	15,5	0,09
7.	Sekolah	1,75	0,01
8.	Perkantoran	3,5	0,02
9.	Lahan Kosong	522,75	3,23
10.	Tempat Ibadah	2,25	0,01
11.	Perkuburan	3	0,02
12.	Hutan	14.225	87,81
13.	Kolam	480	2,96
14.	Lainnya	387	2,4
	<b>Jumlah</b>	<b>16.200 Ha</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Kantor Wali Nagari Aia Batumbuk, 2008



Dari Tabel 5 terlihat, hutan merupakan persentase yang terbesar yaitu 87,81 % dari luas Nagari Aia Batumbuk merupakan kawasan hutan. Kawasan hutan merupakan areal yang dibuka untuk dijadikan areal perkebunan teh organik. Kemudian lahan kosong seluas 3,23 %, sedangkan untuk perkebunan rakyat dan inti memiliki luas 2,4 % dari keseluruhan luas Nagari Aia Batumbuk.

Nagari Aia Batumbuk mempunyai kemiringan yang bervariasi mulai dari datar sampai berbukit dengan kemiringan  $15^{\circ}$  -  $45^{\circ}$ . Nagari Aia Batumbuk terletak pada ketinggian 1325 – 1360 meter diatas permukaan laut, yang memiliki jenis tanah Andosol dan Latosol dengan iklim basah bercurah hujan rata-rata 2650 – 2700 mm/tahun dengan suhu rata-rata  $12^{\circ}\text{C}$  –  $14,20^{\circ}\text{C}$ . Nagari Aia Batumbuk memiliki perbatasan langsung dengan :

- ❖ Sebelah Utara dengan Nagari Sungai Janiah
- ❖ Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pesisir Selatan
- ❖ Sebelah Barat dengan Kayu Jao
- ❖ Sebelah timur dengan Kecamatan Danau Kembar.

#### 4.1.2 Penduduk

Nagari Aia Batumbuk pada tahun 2008 memiliki penduduk sebanyak 2807 jiwa dengan 596 Kepala Keluarga ( KK ). Dari 2807 jiwa penduduk Nagari Aia Batumbuk tersebut tersebar di lima Jorong yaitu Jorong Madang, Koto Baruh, Lambah, Sangkar Puyuh dan Jorong Koto Ateh ( Lampiran 4 ). Penduduk laki – laki berjumlah 1.376 orang, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 1.431 orang ( Tabel 6 ).

Tabel 6. Jumlah Penduduk Masing – Masing Jorong Di Nagari Aia Batumbuk.

No.	Nama Jorong	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase (%)
		Laki - Laki	Perempuan		
1.	Madang	261	237	498	17,74
2.	Koto Baruh	265	284	549	19,56
3.	Lambah	130	150	280	9,98
4.	Sangkar Puyuh	135	143	278	9,9
5.	Koto Ateh	585	617	1202	42,82
<b>Jumlah</b>		<b>1.376</b>	<b>1.431</b>	<b>2.807</b>	<b>100</b>

Sumber: Kantor Wali Nagari Aia batumbuk, 2008



## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap peran kelembagaan petani pada program pengembangan teh organik di Kanagarian Aia batumbuak dapat diambil beberapa kesimpulan :

1. Bergabungnya petani dalam kelompok tani karena adanya banyak kesamaan yaitu kesamaan kepentingan, luas hamparan, bahasa, status ekonomi serta adanya hubungan kekerabatan yang terjalin. Adanya pemimpin dalam kelompok dan aturan yang jelas antara hak dan kewajiban juga faktor yang mempengaruhi petani untuk bergabung dalam satu kelompok tani yang sama. Bergabungnya petani dalam asosiasi kelompok tani lebih kepada faktor permintaan dari investor untuk mengikat petani kedalam hukum yang berlaku, sehingga dana yang diturunkan oleh investor dapat dipertanggungjawabkan oleh petani.
2. Stakeholders yang ikut berperan serta pada program pengembangan teh organik terdiri dari petani peserta program, Lembaga CERDAS sebagai koordinator program, Pemerintah Nagari dan Dishutbun sebagai Pemerintah Kabupaten. Pada tahap perencanaan, yang berperan serta pada lima tahapan adalah Lembaga CERDAS, Dishutbun hanya berperan dalam membangun minat dan kesepakatan, Pemerintah nagari hanya berperan dalam penentuan lokasi sedangkan petani berperan dalam membangun minat. Pada tahap pelaksanaan, petani bekerjasama dengan Lembaga CERDAS pada setiap tahapan kegiatan. Namun pada tahap persiapan lahan untuk survey dan pemetaan lahan dilakukan sendiri oleh Lembaga CERDAS karena kurangnya pengetahuan petani dalam hal budidaya organik.
3. Peran Lembaga CERDAS dalam pengembangan sumberdaya manusia (SDM) dan pengembangan kelembagaan petani telah berjalan sesuai dengan agenda kerja Lembaga CERDAS. Untuk pengembangan SDM, Lembaga CERDAS telah banyak memberikan pelatihan-pelatihan yaitu pelatihan penguatan kelompok tani, pelatihan manajerial kelompok tani dan



pelatihan cara membangun lembaga keuangan mikro. Dan untuk pengembangan kelembagaan kelompok telah terwujud dengan berdirinya Asosiasi Kelompok Teh Organik (AKTOR) yang berbadan hukum sesuai dengan syarat yang diminta oleh pihak asing sebagai penyanggah dana program.

4. Peran Dishutbun sebagai pemerintah kabupaten yang dipilih untuk merencanakan program dalam mempersiapkan peserta program dan menyediakan dana pendampingan juga telah berjalan dengan baik. Peserta yang dipilih untuk mengikuti program pengembangan teh organik oleh Dishutbun sesuai dengan ketentuan Lembaga CERDAS yang menjadi koordinator dalam program pengembangan teh organik tersebut. Dana untuk dana pendampingan juga telah disalurkan oleh Dishutbun kepada petani peserta program secara berkala.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka penulis menyarankan :

1. Perlu adanya peran serta yang lebih banyak dari pemerintah baik kabupaten maupun nagari tidak menyerahkan sepenuhnya kepada Lembaga CERDAS saja.
2. Lembaga CERDAS diharapkan berperan lebih banyak lagi dalam pengembangan sumberdaya manusia sehingga pengetahuan petani peserta pengembangan teh organik bertambah.
3. Perlunya Dishutbun untuk turun langsung ke lapangan melihat kondisi petani dalam melaksanakan program pengembangan teh organik, sehingga dana yang dijanjikan dapat diberikan langsung sebanyak 2 juta rupiah tidak secara berkala.
4. Diharapkan pada program-program pemerintah selanjutnya adalah program-program pemerintah dengan pendampingan oleh pihak luar yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti pada program pengembangan teh organik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. Nurul. 1994. *Peranan LSM Dalam Pembangunan*. <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1994/11/10/0004.html>  
[16 Mei 2009 ]
- Andoyo, Robi. 2008. *Mengenal Pertanian Organik*. <http://www.mitrafkn.com/2008/02/02> [ 27 Desember 2008 ]
- Analisa kebijakan. 2006. *Revitalisasi Pertanian, Pembangunan Agribisnis, dan Pengurangan Kemiskinan*. Pusat Analisa Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor [http://pse.litbang.deptan.go.id/Anjak\\_2006\\_III\\_06](http://pse.litbang.deptan.go.id/Anjak_2006_III_06)  
[ 3 Februari 2009 ]
- Anonymous. 2007. *Peranan Kelompok Tani dalam Ketahanan Pangan*. <http://www.situshijua.co.id> [ 3 Februari 2009 ]
- Apriyantono, Anton. 2005. Keynote Speech Menteri Pertanian: *Neoliberalisme Sebagai Tantangan Kebijakan Pembangunan Pertanian Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Petani*. Universitas Brawijaya, Malang [http://fp.brawijaya.ac.id/student/pdf/pidato\\_mentan.pdf](http://fp.brawijaya.ac.id/student/pdf/pidato_mentan.pdf) [ 3 Februari 2009 ]
- Arifin, Busthanul. 2001. *Spektru Kebijakan Pertanian Indonesia: Telaah Struktur, Kasus dan Alternatif Strategi*. Erlangga. Jakarta
- Ban, A.W. Van Den dan H.S. Hawkins. 1999. *Penyuluhan Pertanian*. Kanisius. Yogyakarta
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif, Kencana*. Prenada Media Group. Jakarta
- CERDAS, Lembaga. 2008. *Standart Operasional Procedure (SOP) Teh Organik*.
- Daniel, Mochar dkk. 2006. *PRA (Participatory Rural Appraisal): Pendekatan Efektif Mendukung Penerapan Penyuluh Partisipatif dalam Upaya Percepatan Pembangunan Pertanian*. Bumi Aksara. Yogyakarta
- Deck, Mc. 2007. *Arti Pertanian Organik*. <http://www.id.shvoong.com/2007/07/16> [ 27 Desember 2008]
- Departemen Pertanian. 2000. *Pedoman Umum Proyek Ketahanan Pangan*. Jakarta
- Departemen, Pertanian. 2005. *Pedoman Umum Pemberdayaan Kelompok Tani Penerima Penguatan Modal Usaha Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A)*. Jakarta
- Dillon, H.S. 2004. *Pertanian Mandiri: Pertanian Membangun Bangsa*. Penebar Swadaya. Jakarta